



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur,...

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Kepala Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat, lembaga teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang

dibentuk...

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Alokasi/Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD dan RD adalah dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
17. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.

18. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD melalui Peraturan Desa.
21. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengalokasian dan penggunaan DBHPD dan RD kepada Desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui Program BPJS ketenagakerjaan;
 - b. memberikan tambahan operasional Pemerintahan Desa dan/atau Pemeliharaan atau Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian DBHPD dan RD berasaskan :
 - a. pemerataan, yakni besaran bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa; dan
 - b. keadilan, yakni besaran bagian pajak dan retribusi daerah secara proporsional.

(2) Asas...

- (2) Asas Pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa.
- (3) Asas Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang proporsional untuk setiap Desa.

BAB III LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 4

- (1) DBHPD dan RD dialokasikan kepada 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan.
- (2) Alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya.
- (3) Alokasi DBHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 pada rekening 5.4.01.01.03.0001 sebesar Rp21.891.222.268,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Alokasi RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 pada rekening 5.4.01.02.01.0001 sebesar Rp1.861.976.900,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Pengalokasian DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam APBDes.
- (3) Penetapan besaran alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada Pemerintah Desa melalui Kecamatan.

BAB IV PENGUNAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penggunaan DBHPD dan RD untuk pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Lamongan meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM); dan
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT).
- (2) DBHPD dan RD setelah digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk penambahan operasional Pemerintah Desa dan/atau pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Besaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 7

- (1) Besaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebesar Rp176.487,00 (seratus tujuh puluh

enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) per orang per bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Besaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk Iuran bulan Januari sampai dengan Desember 2025 pada tribulan I, tribulan II, tribulan III dan tribulan IV.

Pasal 8

- (1) Penghitungan Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada upah minimum Kabupaten Tahun 2025 sebesar Rp3.012.164 (tiga juta dua belas ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan 3 (tiga) fungsi sebagai berikut :

Besaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan

NO	PROGRAM	PERSENTASE		IURAN PER PROGRAM		TOTAL IURAN YANG DIBAYARKAN
		PEMBERI KERJA	TENAGA KERJA	PEMBERI KERJA	TENAGA KERJA	
1	Jaminan Kecelakaan Kerja			6.788,00		6.788,00
2	Jaminan Kematian			8.484,00		8.485,00
3	Jaminan Hari Tua			161.214,00		161.214,00
JUMLAH				176.487,00		176.487,00

Bagian Ketiga

Tambahan Operasional Pemerintah Desa dan/atau untuk Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Pasal 9

- (1) Rincian penggunaan sisa DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipergunakan antara lain untuk :
- a. tambahan operasional Pemerintah Desa (alat tulis kantor, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, listrik/telepon, dan lain-lain);
 - b. kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;

c. kegiatan...

- c. kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- d. pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasana Pemerintah Desa;
- e. lain-lain sesuai hasil musyawarah desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengelolaan DBHPD dan RD kepada Desa merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan sebagai berikut:
 - a. penggunaan DBHPD dan RD dibahas dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam APBDes;
 - b. kegiatan DBHPD dan RD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan; dan
 - c. seluruh pelaksanaan DBHPD dan RD harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.

Pasal 11

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pengelolaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan membentuk:

- a. tim pembina;
- b. tim pengendali;
- c. pelaksana kegiatan anggaran; dan
- d. tim pengawas kegiatan.

Bagian Kedua
Tim Pembina

Pasal 12

- (1) Tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibentuk pada tingkat Daerah yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan diketuai oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan DBHPD dan RD;
 - b. menentukan besarnya DBHPD dan RD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan kepada Bupati berdasarkan rekapitulasi laporan dari Tim Pengendali.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Kegiatan

Pasal 13

- (1) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dibentuk pada tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab : Camat;
 - b. koordinator : Sekretaris Camat;
 - c. ketua : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
 - d. anggota : Staf/petugas teknis kecamatan.
- (2) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengadakan sosialisasi pelaksanaan DBHPD dan RD diwilayahnya;

b. melakukan...

- b. melakukan bimbingan teknis operasional dan penelitian dan perencanaan dan pelaksanaan DBHPD dan RD;
 - c. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan DBHPD dan RD;
 - e. memberikan teguran kepada Kepala Desa apabila pelaksanaan kegiatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. melaksanakan verifikasi usulan kegiatan dan anggaran;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Camat; dan
 - h. melaporkan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan DBHPD dan RD kepada Bupati.
- (3) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat

Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 14

- (1) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dibentuk oleh Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. penanggung jawab : Kepala Desa;
 - b. koordinator : Sekretaris Desa;
 - c. ketua : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. anggota : Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rencana kegiatan DBHPD dan RD yang telah disepakati bersama;
 - b. mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan DBHPD dan RD;

- c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DBHPD dan RD kepada Kepala Desa; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima
Tim Pengawas Kegiatan

Pasal 15

- (1) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh masyarakat.
- (3) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengawasi secara internal kegiatan pembangunan fisik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan Gambar yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun berita acara hasil pengawasan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan DBHPD dan RD kepada Desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Penyaluran...

- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rekening Kas Desa.

Pasal 17

- (1) Penyaluran DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dalam 4 (empat) tribulan :
 - a. tribulan I pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025;
 - b. tribulan II untuk pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan mulai bulan April sampai dengan Juni 2025;
 - c. tribulan III untuk pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan mulai bulan Juli sampai dengan September 2025;
 - d. tribulan IV untuk pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 dan untuk pembayaran tambahan operasional Pemerintah Desa dan/atau untuk pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa.
- (2) Pengajuan DBHPD dan RD dilakukan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes.
- (3) Pengajuan Permohonan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (4) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran DBHPD dan RD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 18

- (1) Camat mengajukan permohonan penyaluran DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan dilampiri:

a. Peraturan...

- a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 dan/atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025;
 - b. daftar rekapitulasi Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan Desa;
 - c. daftar rekapitulasi nomor RKD dan besaran DBHPD dan RD yang diajukan;
 - d. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditunjuk Bupati;
 - e. kwitansi tanda terima DBHPD dan RD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur keuangan;
 - f. fotokopi Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian DBHPD dan RD tahun 2025;
 - g. berita acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran DBHPD dan RD.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f disampaikan kepada Kepala DPMD, dan huruf g disimpan di Kecamatan.
- (3) Berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan 3 (tiga) berkas disampaikan kepada Kepala BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD dan 1 (satu) berkas untuk arsip Kecamatan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran Operasional Pemerintahan Desa

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Pengajuan DPHPD dan RD oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Camat mengajukan surat permohonan penyaluran DPHPD dan RD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan dilampiri :
- a. daftar rekapitulasi nomor RKD dan besaran DBHPD dan RD yang diajukan;
 - b. fotokopi buku RKD yang ditunjuk oleh Bupati;

- c. kwitansi tanda terima DBHPD dan RD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur keuangan;
 - d. berita acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran DPHPD dan RD.
- (2) Berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan 3 (tiga) berkas disampaikan kepada Kepala BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, dan 1 (satu) berkas untuk arsip Kecamatan.

BAB VII TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 20

Pencairan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 21

- (1) Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa dilengkapi dengan:
 - a. pernyataan surat tanggungjawab belanja mutlak (SPTJBM); dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (3) Dalam pengajuan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji...

- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
- (5) Kaur Keuangan sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

BAB VIII

EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melaksanakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan DBHPD dan RD yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah adanya proses pencairan tribulan I, tribulan II, tribulan III, dan tribulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat melalui Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan DBHPD dan RD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya kegiatan Penambahan operasional Pemerintah Desa dan/atau Pemeliharaan atau Pembangunan prasarana dan sarana Pemerintah Desa meliputi :
 - a. penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau gambar;
 - b. realisasi penggunaan DBHPD dan RD;
 - c. penatausahaan keuangan DBHPD dan RD
 - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e. penyampaian laporan penggunaan DBHPD dan RD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap pengalokasian dan penyaluran DBHPD dan RD kepada Desa dilakukan sebagai berikut:

- a. pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan melekat dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan dari tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat berupa saran serta laporan yang bersifat membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)
1.	2	3	4
1.	Sukorame	1. Sembung	35.454.500,00
		2. Bangle	39.793.400,00
		3. Kedungkumpul	57.939.200,00
		4. Sukorame	64.276.700,00
		5. Mragel	38.101.600,00
		6. Kedungrejo	34.876.600,00
		7. Sewor	41.601.500,00
		8. Wedoro	42.425.000,00
		9. Pendowokumpul	42.668.200,00
2.	Bluluk	1. Talunrejo	42.432.000,00
		2. Banjargondang	39.924.900,00
		3. Bluluk	51.714.100,00
		4. Cangkring	41.937.600,00
		5. Bronjong	40.840.600,00
		6. Songowareng	48.284.900,00
		7. Kuwurejo	46.017.700,00
		8. Sumberbanjar	48.751.100,00
		9. Primpen	40.999.400,00
3.	Modo	1. Jegreg	56.825.500,00
		2. Kedungpengaron	42.783.600,00
		3. Sumberagung	47.282.200,00
		4. Kedunglerep	40.918.000,00
		5. Jatipayak	46.197.400,00
		6. Kedungwaras	44.054.200,00
		7. Sidomulyo	42.712.300,00
		8. Sambangrejo	36.000.800,00
		9. Medalem	37.883.500,00
		10. Sidodowo	54.044.000,00
		11. Mojorejo	62.520.900,00
		12. Sambongrejo	37.250.600,00
		13. Kedungrejo	45.075.200,00
		14. Kacangan	51.075.100,00
		15. Nguwok	68.800.700,00
		16. Pule	51.379.500,00
		17. Yungyang	45.587.700,00

1.	2	3	4
4.	Ngimbang	1. Kedungmentawar	37.470.900,00
		2. Cerme	36.674.700,00
		3. Gebangangkrik	40.198.500,00
		4. Ngasemlemahbang	38.838.800,00
		5. Slaharwotan	55.412.400,00
		6. Ganggangtingan	41.983.400,00
		7. Jejel	38.034.400,00
		8. Purwokerto	42.916.400,00
		9. Kakatpenjalin	44.228.100,00
		10. Tlemang	36.022.600,00
		11. Mendogo	43.581.400,00
		12. Lawak	52.797.400,00
		13. Drujugurit	35.687.300,00
		14. Girik	40.371.000,00
		15. Munungrejo	53.362.900,00
		16. Ngimbang	37.190.200,00
		17. Durikedungjero	39.785.700,00
		18. Lamongrejo	129.300.400,00
		19. Sendangrejo	61.511.300,00
5.	Babat	1. Karangkembang	49.895.700,00
		2. Pucakwangi	41.460.200,00
		3. Sogo	38.097.600,00
		4. Bedahan	45.733.900,00
		5. Truni	36.967.200,00
		6. Gendongkulon	73.136.500,00
		7. Plaosan	59.441.300,00
		8. Trepan	100.618.300,00
		9. Kuriipan	48.380.200,00
		10. Kebalanpelang	49.906.400,00
		11. Sumurgenuk	44.809.000,00
		12. Gembong	62.724.600,00
		13. Bulumargi	58.030.700,00
		14. Datinawong	48.121.800,00
		15. Kebalandono	49.670.500,00
		16. Patihan	41.542.100,00
		17. Moropelang	49.531.700,00
		18. Keyongan	43.645.200,00
		19. Sambangan	40.306.600,00
		20. Tritunggal	48.766.600,00
		21. Kebonagung	38.385.800,00
6.	Kedungpring	1. Dradahblumbang	110.325.800,00
		2. Kalen	65.557.900,00
		3. Mojodadi	43.728.400,00
		4. Gunungrejo	45.819.200,00
		5. Warungering	43.429.600,00
		6. Jatidrojek	41.143.700,00
		7. Kradenanrejo	43.544.300,00
		8. Kandangrejo	48.563.100,00
		9. Kedungpring	64.366.700,00

1.	2	3	4
		10. Tlanak	53.109.200,00
		11. Sukomalo	44.184.300,00
		12. Mlati	39.511.400,00
		13. Karangcangkring	34.925.800,00
		14. Mekanderejo	49.327.300,00
		15. Banjarejo	47.001.700,00
		16. Sidobangun	31.143.300,00
		17. Blawirejo	42.890.500,00
		18. Maindu	41.461.300,00
		19. Tenggerejo	42.590.300,00
		20. Majenang	47.892.100,00
		21. Sidomlangen	48.229.600,00
		22. Nglebur	43.886.600,00
		23. Sumengko	37.892.100,00
7.	Brondong	1. Lohgung	50.145.400,00
		2. Labuhan	70.485.500,00
		3. Sidomukti	61.296.300,00
		4. Brengkok	97.889.400,00
		5. Tlogoretno	156.541.800,00
		6. Sendangharjo	53.364.600,00
		7. Lembor	44.813.800,00
		8. Sedayulawas	167.904.700,00
		9. Sumberagung	40.375.700,00
8.	Laren	1. Dateng	36.835.200,00
		2. Jabung	42.972.200,00
		3. Keduyung	35.596.600,00
		4. Centini	40.938.000,00
		5. Durikulon	35.969.100,00
		6. Pesanggrahan	33.127.700,00
		7. Gelap	47.646.600,00
		8. Mojoasem	33.553.000,00
		9. Siser	35.710.600,00
		10. Bulutigo	42.477.700,00
		11. Pelangwot	47.033.300,00
		12. Laren	38.291.300,00
		13. Gampangsejati	41.033.700,00
		14. Tamanprijek	40.626.400,00
		15. Karangtawar	42.055.700,00
		16. Tejoasri	44.608.800,00
		17. Godog	39.574.700,00
		18. Bulubransi	44.495.600,00
		19. Karangwungulor	32.342.900,00
		20. Brangsi	41.675.200,00
9.	Sekaran	1. Besur	38.537.500,00
		2. Titik	34.306.300,00
		3. Kendal	36.636.000,00
		4. Keting	33.508.900,00
		5. Ngarum	38.538.000,00
		6. Kebalankulon	38.392.000,00

1.	2	3	4
		7. Kudikan	35.769.300,00
		8. Jugo	49.009.000,00
		9. Manyar	43.727.700,00
		10. Trosono	39.122.400,00
		11. Latek	39.230.500,00
		12. Miru	38.576.400,00
		13. Sekaran	62.253.900,00
		14. Moro	35.313.600,00
		15. Karang	38.620.300,00
		16. Kembangan	37.111.600,00
		17. Siman	42.273.200,00
		18. Bulutengger	44.608.400,00
		19. Porodeso	34.900.000,00
		20. Bugel	32.018.000,00
		21. Sungegeneng	59.586.300,00
10.	Maduran	1. Duriwetan	42.320.000,00
		2. Taji	36.927.700,00
		3. Brumbun	44.218.100,00
		4. Siwuran	37.971.400,00
		5. Klangensrampat	39.053.100,00
		6. Pangean	45.575.100,00
		7. Maduran	38.334.900,00
		8. Jangkungsono	32.935.600,00
		9. Parengan	34.255.900,00
		10. Pangkatrejo	31.878.700,00
		11. Kanugrahan	43.420.200,00
		12. Gumantuk	41.267.900,00
		13. Ngayung	46.646.900,00
		14. Pringgoboyo	36.641.800,00
		15. Gedangan	38.916.300,00
		16. Turi	38.772.600,00
		17. Blumbang	34.310.600,00
11.	Sambeng	1. Sidokumpul	51.852.900,00
		2. Pasarlegi	45.815.600,00
		3. Semampirejo	41.085.700,00
		4. Wateswinangun	49.052.200,00
		5. Sumbersari	37.696.300,00
		6. Pataan	41.334.500,00
		7. Tenggiring	38.566.200,00
		8. Garung	37.213.800,00
		9. Wonorejo	35.693.400,00
		10. Ardirejo	45.816.400,00
		11. Sekidang	30.256.758,00
		12. Kedungwangi	43.078.200,00
		13. Jatipandak	35.832.700,00
		14. Candisari	45.544.100,00
		15. Nogojatisari	38.662.200,00
		16. Pamotan	42.679.000,00
		17. Wudi	37.803.100,00

1.	2	3	4
		18. Barurejo	36.135.600,00
		19. Kedungbanjar	31.322.000,00
		20. Gempolmanis	40.412.500,00
		21. Selorejo	37.451.200,00
		22. Kreteranggon	42.820.300,00
12.	Sugio	1. Sidobogem	34.669.300,00
		2. Kalitengah	34.509.600,00
		3. Kedungdadi	52.914.500,00
		4. Sidorejo	52.315.300,00
		5. Kedungbanjar	41.496.100,00
		6. Bedingin	54.347.100,00
		7. Bakalanrejo	50.635.400,00
		8. Gondanglor	52.028.200,00
		9. Pangkatrejo	46.526.700,00
		10. Karangsambigalih	47.628.100,00
		11. Supenuh	42.342.900,00
		12. Lebakadi	55.243.400,00
		13. Deketagung	47.348.500,00
		14. Jubellor	43.550.700,00
		15. Sugio	71.385.700,00
		16. Daliwangun	37.880.600,00
		17. Jubelkidul	55.714.900,00
		18. Lawanganagung	48.900.100,00
		19. Kalipang	43.819.800,00
		20. German	49.634.800,00
		21. Sekarbagus	58.964.100,00
13.	Pucuk	1. Pucuk	62.633.800,00
		2. Gempolpading	47.700.400,00
		3. Kesambi	37.736.000,00
		4. Plososetro	34.711.700,00
		5. Wanar	58.727.600,00
		6. Karangtinggil	54.655.500,00
		7. Warukulon	65.722.400,00
		8. Waruwetan	38.752.100,00
		9. Kedali	36.086.400,00
		10. Paji	81.568.500,00
		11. Sumberejo	43.112.000,00
		12. Cungkup	45.075.600,00
		13. Bogoharjo	41.348.300,00
		14. Ngambeg	46.386.100,00
		15. Babatkumpul	38.225.600,00
		16. Tanggungan	46.846.800,00
		17. Padenganploso	50.067.100,00
14.	Paciran	1. Kandangsemangkon	90.359.800,00
		2. Paciran	154.512.200,00
		3. Sumurgayam	55.511.700,00
		4. Sendangagung	64.501.300,00
		5. Sendangduwur	32.976.700,00
		6. Tunggul	57.167.900,00

1.	2	3	4
		7. Kranji	60.713.200,00
		8. Drajat	38.715.000,00
		9. Banjarwati	64.794.800,00
		10. Kemantren	148.499.900,00
		11. Sidokelar	147.311.300,00
		12. Tlogosadang	57.462.400,00
		13. Paloh	32.014.800,00
		14. Weru	43.054.600,00
		15. Sidokumpul	33.954.100,00
		16. Warulor	31.537.900,00
15.	Solokuro	1. Dadapan	84.824.200,00
		2. Tebluru	50.210.400,00
		3. Sugihan	57.313.700,00
		4. Tenggulun	52.596.400,00
		5. Payaman	94.740.800,00
		6. Solokuro	57.789.300,00
		7. Takerharjo	85.881.200,00
		8. Dagan	62.698.700,00
		9. Banyubang	45.791.800,00
		10. Bluri	50.246.900,00
16.	Mantup	1. Sukobendu	57.803.000,00
		2. Tunggunjagir	59.308.100,00
		3. Sumberbendo	40.701.400,00
		4. Mantup	75.372.200,00
		5. Kedungbembem	38.056.100,00
		6. Sumberdadi	50.620.500,00
		7. Kedungsoko	56.452.900,00
		8. Tugu	39.223.400,00
		9. Sokosari	42.907.000,00
		10. Sumberagung	38.675.500,00
		11. Sidomulyo	39.385.800,00
		12. Mojosari	41.746.700,00
		13. Pelabuhanrejo	42.331.400,00
		14. Sumberkerep	48.577.200,00
		15. Rumpuk	37.714.500,00
17.	Sukodadi	1. Siwalanrejo	36.643.800,00
		2. Kebonsari	63.421.400,00
		3. Sukolilo	63.595.700,00
		4. Pajangan	40.167.500,00
		5. Kadungrebug	46.408.700,00
		6. Sumberagung	45.072.200,00
		7. Sukodadi	82.300.600,00
		8. Sumberaji	45.273.700,00
		9. Menongo	48.470.800,00
		10. Madulegi	50.332.800,00
		11. Banjarejo	51.836.700,00
		12. Plumpang	43.399.000,00
		13. Bandungsari	39.966.600,00
		14. Sidogembul	50.960.100,00

1.	2	3	4
		15. Balongtawun	50.476.400,00
		16. Gedangan	47.946.300,00
		17. Tlogorejo	40.183.100,00
		18. Baturono	46.176.300,00
		19. Surabayan	43.982.300,00
		20. Sugihrejo	39.349.200,00
18.	Karanggeneng	1. Bantengputih	37.177.100,00
		2. Karangrejo	34.609.400,00
		3. Latukan	48.400.300,00
		4. Guci	37.175.300,00
		5. Kaligerman	34.012.900,00
		6. Sungelebak	41.462.800,00
		7. Prijekngablak	37.731.200,00
		8. Tracal	35.028.600,00
		9. Sonoadi	36.592.100,00
		10. Kalanganyar	37.573.700,00
		11. Banjarmadu	51.141.900,00
		12. Kendalkemlagi	48.139.700,00
		13. Kawistolegi	43.113.400,00
		14. Jagran	36.493.200,00
		15. Karangwungu	35.894.300,00
		16. Sumberwudi	42.741.700,00
		17. Karanggeneng	37.786.800,00
		18. Mertani	44.676.000,00
19.	Kembangbahu	1. Tlogoagung	46.468.400,00
		2. Kedungmegarih	43.509.700,00
		3. Sidomukti	39.546.500,00
		4. Sukosongo	42.115.600,00
		5. Kaliwates	40.534.700,00
		6. Kedungasri	37.006.700,00
		7. Doyomulyo	45.678.000,00
		8. Kembangbahu	47.137.400,00
		9. Maor	36.472.700,00
		10. Moronyamplung	76.220.400,00
		11. Mangkujajar	35.633.200,00
		12. Puter	57.736.900,00
		13. Pelang	70.404.600,00
		14. Dumpiagung	57.739.200,00
		15. Randubener	38.753.100,00
		16. Lopang	81.934.700,00
		17. Gintungan	41.487.900,00
		18. Katemas	44.066.100,00
20.	Kalitengah	1. Pucangro	42.812.400,00
		2. Pucangtelu	39.398.700,00
		3. Somosari	37.668.800,00
		4. Jelakcatur	36.784.500,00
		5. Mungli	37.027.700,00
		6. Pegangsalan	34.284.300,00
		7. Dibe	37.282.700,00

1.	2	3	4
		8. Butungan	34.017.400,00
		9. Lukrejo	43.814.600,00
		10. Tiwet	32.454.000,00
		11. Blajo	32.835.500,00
		12. Kalitengah	34.965.400,00
		13. Gambuhan	31.779.700,00
		14. Cluring	33.027.200,00
		15. Bojoasri	40.137.200,00
		16. Kediren	35.753.500,00
		17. Kuluran	39.827.600,00
		18. Canditunggal	35.341.100,00
		19. Sugihwaras	40.957.800,00
		20. Tunjungmekar	34.772.400,00
21.	Turi	1. Geger	45.306.300,00
		2. Badurame	39.319.400,00
		3. Karangwedoro	44.505.200,00
		4. Wangunrejo	36.260.500,00
		5. Putatkumpul	45.021.600,00
		6. Keben	39.792.900,00
		7. Sukoanyar	42.664.900,00
		8. Kemlagigede	45.459.600,00
		9. Turi	40.470.300,00
		10. Kemlagilor	37.716.100,00
		11. Sukorejo	36.354.300,00
		12. Tawangrejo	44.791.100,00
		13. Bambang	35.095.300,00
		14. Pomahanjangan	36.050.100,00
		15. Tambakploso	40.423.000,00
		16. Balun	62.617.400,00
		17. Ngujungrejo	35.537.400,00
		18. Kepundibener	42.587.000,00
		19. Gedongboyountung	48.527.700,00
22.	Lamongan	1. Rancangkencono	45.054.700,00
		2. Karanglangit	54.047.600,00
		3. Pangkatrejo	48.798.800,00
		4. Kebet	43.008.500,00
		5. Sendangrejo	47.225.500,00
		6. Sumberejo	59.906.600,00
		7. Tanjung	71.285.100,00
		8. Plosowahyu	107.734.000,00
		9. Wajik	51.104.100,00
		10. Kramat	47.237.700,00
		11. Made	112.966.200,00
		12. Sidomukti	52.754.800,00
23.	Tikung	1. Wonokromo	58.706.100,00
		2. Soko	59.882.000,00
		3. Guminingrejo	45.025.900,00
		4. Bakalanpule	55.881.200,00
		5. Takeraklating	74.492.400,00

1.	2	3	4
		6. Kelorarum	41.277.500,00
		7. Jotosanur	50.947.600,00
		8. Pengumbulanadi	53.293.800,00
		9. Jatirejo	57.717.700,00
		10. Dukuhagung	58.573.800,00
		11. Tambakrigadung	82.821.300,00
		12. Botoputih	39.103.500,00
		13. Balongwangi	53.124.000,00
24.	Karangbinangun	1. Waruk	35.490.100,00
		2. Sukorejo	47.467.600,00
		3. Karanganom	38.562.300,00
		4. Somowinangun	40.113.600,00
		5. Ketapangtelu	45.630.300,00
		6. Mayong	47.477.600,00
		7. Palangan	44.220.100,00
		8. Blawi	51.334.100,00
		9. Banjarejo	45.196.800,00
		10. Putatbangah	41.071.800,00
		11. Banyuurip	35.021.800,00
		12. Pendowolimo	45.462.000,00
		13. Baranggalam	34.365.500,00
		14. Watangpanjang	36.522.800,00
		15. Sambopinggir	42.025.600,00
		16. Priyoso	34.348.500,00
		17. Windu	39.770.800,00
		18. Bogobabadan	38.439.900,00
		19. Gawerejo	37.735.400,00
		20. Kuro	38.379.100,00
		21. Karangbinangun	36.355.300,00
25.	Deket	1. Sidorejo	39.341.400,00
		2. Dlanggu	51.473.600,00
		3. Laladan	40.654.100,00
		4. Deketkulon	66.542.900,00
		5. Deketwetan	52.968.100,00
		6. Sugihwaras	42.520.700,00
		7. Dinoyo	45.400.800,00
		8. Sidomulyo	40.082.100,00
		9. Rejosari	242.202.400,00
		10. Pandanpancur	77.002.700,00
		11. Sidobinangun	41.971.800,00
		12. Babatagung	43.136.200,00
		13. Tukerto	45.686.500,00
		14. Weduni	37.476.200,00
		15. Rejotengah	41.551.500,00
		16. Srirande	44.718.300,00
		17. Plosoboden	41.559.800,00
26.	Glagah	1. Soko	38.807.100,00
		2. Morocalon	33.598.400,00
		3. Gempolpendowo	34.840.300,00

1.	2	3	4		
		4. Pasi	38.466.300,00		
		5. Rayunggumuk	40.426.900,00		
		6. Menganti	39.718.800,00		
		7. Margoanyar	39.684.400,00		
		8. Began	31.297.900,00		
		9. Mendogo	34.336.600,00		
		10. Kentong	36.685.600,00		
		11. Sudangan	34.964.600,00		
		12. Medang	34.775.900,00		
		13. Duduklor	35.886.000,00		
		14. Glagah	42.717.500,00		
		15. Wangen	35.968.500,00		
		16. Tanggungprigel	37.353.400,00		
		17. Karangagung	36.098.400,00		
		18. Bangkok	34.420.400,00		
		19. Jatirenggo	37.681.900,00		
		20. Bapuhbaru	35.576.800,00		
		21. Bapuhbandung	36.115.200,00		
		22. Meluntur	33.524.100,00		
		23. Konang	31.970.400,00		
		24. Dukuhtunggal	42.236.100,00		
		25. Panggang	33.947.400,00		
		26. Wonorejo	33.860.400,00		
		27. Wedoro	32.781.600,00		
		28. Karangturi	36.807.000,00		
		29. Meluwur	33.655.000,00		
		27.	Sarirejo	1. Kedungkumpul	46.482.300,00
				2. Dermolemahbang	75.438.300,00
				3. Simbatan	47.177.700,00
4. Sumberejo	45.921.700,00				
5. Canggah	36.628.300,00				
6. Beru	42.485.800,00				
7. Tambakmenjangan	70.438.000,00				
8. Gempoltukmloko	47.635.900,00				
9. Sarirejo	48.204.100,00				
	TOTAL		21.891.222.258,00		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RO'IS

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI (Rp)
1.	2	3	4
1.	Sukorame	1. Sembung	3.015.600,00
		2. Bangle	3.384.600,00
		3. Kedungkumpul	4.928.000,00
		4. Sukorame	5.467.100,00
		5. Mragel	3.240.700,00
		6. Kedungrejo	2.966.400,00
		7. Sewor	3.538.400,00
		8. Wedoro	3.608.400,00
		9. Pendowokumpul	3.629.100,00
2.	Bluluk	1. Talunrejo	3.609.000,00
		2. Banjargondang	3.395.800,00
		3. Bluluk	4.398.500,00
		4. Cangkring	3.567.000,00
		5. Bronjong	3.473.700,00
		6. Songowareng	4.106.900,00
		7. Kuwurejo	3.914.000,00
		8. Sumberbanjar	4.146.500,00
		9. Primpen	3.487.200,00
3.	Modo	1. Jegreg	4.833.300,00
		2. Kedungpengaron	3.639.000,00
		3. Sumberagung	4.021.600,00
		4. Kedunglerep	3.480.300,00
		5. Jatipayak	3.929.300,00
		6. Kedungwaras	3.747.000,00
		7. Sidomulyo	3.632.900,00
		8. Sambangrejo	3.062.000,00
		9. Medalem	3.222.200,00
		10. Sidodowo	4.596.700,00
		11. Mojorejo	5.317.700,00
		12. Sambongrejo	3.168.300,00
		13. Kedungrejo	3.833.900,00
		14. Kacangan	4.344.200,00
		15. Nguwok	5.851.900,00
		16. Pule	4.370.100,00
		17. Yungyang	3.877.500,00

1.	2	3	4
4.	Ngimbang	1. Kedungmentawar	3.187.100,00
		2. Cerme	3.119.400,00
		3. Gebangangkrik	3.419.100,00
		4. Ngasemlemahbang	3.303.400,00
		5. Slaharwotan	4.713.100,00
		6. Ganggangtingan	3.570.900,00
		7. Jejel	3.235.000,00
		8. Purwokerto	3.650.200,00
		9. Kakatpenjalin	3.761.800,00
		10. Tlemang	3.063.900,00
		11. Mendogo	3.706.800,00
		12. Lawak	4.490.700,00
		13. Drujugurit	3.035.400,00
		14. Girik	3.433.700,00
		15. Munungrejo	4.538.800,00
		16. Ngimbang	3.163.200,00
		17. Durikedungjero	3.384.000,00
		18. Lamongrejo	10.997.700,00
		19. Sendangrejo	5.231.900,00
5.	Babat	1. Karangkembang	4.243.900,00
		2. Pucakwangi	3.526.400,00
		3. Sogo	3.240.400,00
		4. Bedahan	3.889.900,00
		5. Truni	3.144.200,00
		6. Gendongkulon	6.220.600,00
		7. Plaosan	5.055.800,00
		8. Trepan	8.558.100,00
		9. Kuripan	4.115.000,00
		10. Kebalanpelang	4.244.800,00
		11. Sumurgenuk	3.811.200,00
		12. Gembong	5.335.000,00
		13. Bulumargi	4.935.800,00
		14. Datinawong	4.093.000,00
		15. Kebalandono	4.224.700,00
		16. Patihan	3.533.400,00
		17. Moropelang	4.212.900,00
		18. Keyongan	3.712.200,00
		19. Sambangan	3.428.300,00
		20. Tritunggal	4.147.800,00
		21. Kebonagung	3.264.900,00
6.	Kedungpring	1. Dradahblumbang	9.383.800,00
		2. Kalen	5.576.000,00
		3. Mojodadi	3.719.300,00
		4. Gunungrejo	3.897.100,00
		5. Warungering	3.693.900,00
		6. Jatidrojek	3.499.500,00
		7. Kradenanrejo	3.703.700,00
		8. Kandangrejo	4.130.500,00
		9. Kedungpring	5.474.700,00

1.	2	3	4
		10. Tlanak	4.517.200,00
		11. Sukomalo	3.758.100,00
		12. Mlati	3.360.600,00
		13. Karangcangkring	2.970.600,00
		14. Mekanderejo	4.195.500,00
		15. Banjarejo	3.997.700,00
		16. Sidobangun	2.648.900,00
		17. Blawirejo	3.648.000,00
		18. Maindu	3.526.500,00
		19. Tenggerejo	3.622.500,00
		20. Majenang	4.073.500,00
		21. Sidomlangen	4.102.200,00
		22. Nglebur	3.732.800,00
		23. Sumengko	3.222.900,00
7.	Brondong	1. Lohgung	4.265.100,00
		2. Labuhan	5.995.200,00
		3. Sidomukti	5.213.600,00
		4. Brengkok	8.326.000,00
		5. Tlogoretno	13.314.800,00
		6. Sendangharjo	4.538.900,00
		7. Lembor	3.811.600,00
		8. Sedayulawas	14.281.200,00
		9. Sumberagung	3.434.100,00
8.	Laren	1. Dateng	3.133.000,00
		2. Jabung	3.655.000,00
		3. Keduyung	3.027.700,00
		4. Centini	3.482.000,00
		5. Durikulon	3.059.300,00
		6. Pesanggrahan	2.817.700,00
		7. Gelap	4.052.600,00
		8. Mojoasem	2.853.800,00
		9. Siser	3.037.400,00
		10. Bulutigo	3.612.900,00
		11. Pelangwot	4.000.400,00
		12. Laren	3.256.900,00
		13. Gampangsejati	3.490.100,00
		14. Tamanprijek	3.455.500,00
		15. Karangtawar	3.577.000,00
		16. Tejoasri	3.794.200,00
		17. Godog	3.366.000,00
		18. Bulubrangsi	3.784.600,00
		19. Karangwungulor	2.750.900,00
		20. Brangsi	3.544.700,00
9.	Sekaran	1. Besur	3.277.800,00
		2. Titik	2.917.900,00
		3. Kendal	3.116.100,00
		4. Keting	2.850.100,00
		5. Ngarum	3.277.800,00
		6. Kebalankulon	3.265.400,00

1.	2	3	4
		7. Kudikan	3.042.300,00
		8. Jugo	4.168.500,00
		9. Manyar	3.719.300,00
		10. Trosono	3.327.500,00
		11. Latek	3.336.700,00
		12. Miru	3.281.100,00
		13. Sekaran	5.295.000,00
		14. Moro	3.003.600,00
		15. Karang	3.284.800,00
		16. Kembangan	3.156.500,00
		17. Siman	3.595.500,00
		18. Bulutengger	3.794.200,00
		19. Porodeso	2.968.400,00
		20. Bugel	2.723.300,00
		21. Sungegeneng	5.068.100,00
10.	Maduran	1. Duriwetan	3.599.500,00
		2. Taji	3.140.900,00
		3. Brumbun	3.761.000,00
		4. Siwuran	3.229.600,00
		5. Klangensrampat	3.321.700,00
		6. Pangean	3.876.400,00
		7. Maduran	3.260.600,00
		8. Jangkungsono	2.801.300,00
		9. Parengan	2.913.600,00
		10. Pangkatrejo	2.711.400,00
		11. Kanugrahan	3.693.100,00
		12. Gumantuk	3.510.000,00
		13. Ngayung	3.967.500,00
		14. Pringgoboyo	3.116.600,00
		15. Gedangan	3.310.000,00
		16. Turi	3.297.800,00
		17. Blumbang	2.918.300,00
11.	Sambeng	1. Sidokumpul	4.410.300,00
		2. Pasarlegi	3.896.800,00
		3. Semampirejo	3.494.500,00
		4. Wateswinangun	4.172.100,00
		5. Sumbersari	3.206.200,00
		6. Pataan	3.515.700,00
		7. Tenggiring	3.280.200,00
		8. Garung	3.165.200,00
		9. Wonorejo	3.035.900,00
		10. Ardirejo	3.896.900,00
		11. Sekidang	2.594.700,00
		12. Kedungwangi	3.664.000,00
		13. Jatipandak	3.047.700,00
		14. Candisari	3.873.800,00
		15. Nogojatisari	3.288.400,00
		16. Pamotan	3.630.100,00
		17. Wudi	3.215.300,00

1.	2	3	4
		18. Barurejo	3.073.500,00
		19. Kedungbanjar	2.664.100,00
		20. Gempolmanis	3.437.300,00
		21. Selorejo	3.185.400,00
		22. Kreteranggon	3.642.100,00
12.	Sugio	1. Sidobogem	2.948.800,00
		2. Kalitengah	2.935.200,00
		3. Kedungdadi	4.500.600,00
		4. Sidorejo	4.449.700,00
		5. Kedungbanjar	3.529.400,00
		6. Bedingin	4.622.500,00
		7. Bakalanrejo	4.306.800,00
		8. Gondanglor	4.425.300,00
		9. Pangkatrejo	3.957.300,00
		10. Karangsambigalih	4.051.000,00
		11. Supenuh	3.601.500,00
		12. Lebakadi	4.698.700,00
		13. Deketagung	4.027.200,00
		14. Jubellor	3.704.200,00
		15. Sugio	6.071.700,00
		16. Daliwangun	3.221.900,00
		17. Jubelkidul	4.738.800,00
		18. Lawanganagung	4.159.200,00
		19. Kalipang	3.727.100,00
		20. German	4.221.700,00
		21. Sekarbagus	5.015.200,00
13.	Pucuk	1. Pucuk	5.327.300,00
		2. Gempolpadding	4.057.200,00
		3. Kesambi	3.209.600,00
		4. Plososetro	2.952.400,00
		5. Wanar	4.995.100,00
		6. Karangtinggil	4.648.700,00
		7. Warukulon	5.590.000,00
		8. Waruwetan	3.296.000,00
		9. Kedali	3.069.300,00
		10. Paji	6.937.800,00
		11. Sumberejo	3.666.900,00
		12. Cungkup	3.833.900,00
		13. Bogoharjo	3.516.900,00
		14. Ngambeg	3.945.400,00
		15. Babatkumpul	3.251.300,00
		16. Tanggungan	3.984.500,00
		17. Padenganploso	4.258.500,00
14.	Paciran	1. Kandangsemangkon	7.685.600,00
		2. Paciran	13.142.100,00
		3. Sumurgayam	4.721.500,00
		4. Sendangagung	5.486.200,00
		5. Sendangduwur	2.804.800,00
		6. Tunggul	4.862.400,00

1.	2	3	4
		7. Kranji	5.164.000,00
		8. Drajat	3.292.900,00
		9. Banjarwati	5.511.100,00
		10. Kemantren	12.630.700,00
		11. Sidokelar	12.529.600,00
		12. Tlogosadang	4.887.500,00
		13. Paloh	2.723.000,00
		14. Weru	3.662.000,00
		15. Sidokumpul	2.888.000,00
		16. Warulor	2.682.400,00
15.	Solokuro	1. Dadapan	7.214.800,00
		2. Tebluru	4.270.600,00
		3. Sugihan	4.874.800,00
		4. Tenggulun	4.473.600,00
		5. Payaman	8.058.200,00
		6. Solokuro	4.915.300,00
		7. Takerharjo	7.304.700,00
		8. Dagan	5.332.900,00
		9. Banyubang	3.894.800,00
		10. Bluri	4.273.700,00
16.	Mantup	1. Sukobendu	4.916.400,00
		2. Tunggunjagir	5.044.500,00
		3. Sumberbendo	3.461.800,00
		4. Mantup	6.410.800,00
		5. Kedungbembem	3.236.800,00
		6. Sumberdadi	4.305.500,00
		7. Kedungsoko	4.801.600,00
		8. Tugu	3.336.100,00
		9. Sokosari	3.649.400,00
		10. Sumberagung	3.289.500,00
		11. Sidomulyo	3.349.900,00
		12. Mojosari	3.550.800,00
		13. Pelabuhanrejo	3.600.500,00
		14. Sumberkerep	4.131.700,00
		15. Rumpuk	3.207.800,00
17.	Sukodadi	1. Siwalanrejo	3.116.700,00
		2. Kebonsari	5.394.300,00
		3. Sukolilo	5.409.100,00
		4. Pajangan	3.416.400,00
		5. Kadungrembug	3.947.300,00
		6. Sumberagung	3.833.600,00
		7. Sukodadi	7.000.100,00
		8. Sumberaji	3.850.800,00
		9. Menongo	4.122.700,00
		10. Madulegi	4.281.100,00
		11. Banjarejo	4.409.000,00
		12. Plumpang	3.691.300,00
		13. Bandungsari	3.399.300,00
		14. Sidogembul	4.334.400,00

1.	2	3	4
		15. Balongtawun	4.293.300,00
		16. Gedangan	4.078.100,00
		17. Tlogorejo	3.417.800,00
		18. Baturono	3.927.500,00
		19. Surabayan	3.740.900,00
		20. Sugihrejo	3.346.800,00
18.	Karanggeneng	1. Bantengputih	3.162.100,00
		2. Karangrejo	2.943.700,00
		3. Latukan	4.116.700,00
		4. Guci	3.161.900,00
		5. Kaligerman	2.893.000,00
		6. Sungelebak	3.526.600,00
		7. Prijekngablak	3.209.200,00
		8. Tracal	2.979.300,00
		9. Sonoadi	3.112.300,00
		10. Kalanganyar	3.195.800,00
		11. Banjarmadu	4.349.900,00
		12. Kendalkemlagi	4.094.500,00
		13. Kawistolegi	3.667.000,00
		14. Jagran	3.103.900,00
		15. Karangwungu	3.053.000,00
		16. Sumberwudi	3.635.400,00
		17. Karanggeneng	3.213.900,00
		18. Mertani	3.799.900,00
19.	Kembangbahu	1. Tlogoagung	3.952.400,00
		2. Kedungmegarih	3.700.700,00
		3. Sidomukti	3.363.600,00
		4. Sukosongo	3.582.100,00
		5. Kaliwates	3.447.700,00
		6. Kedungasri	3.147.600,00
		7. Doyomulyo	3.885.100,00
		8. Kembangbahu	4.009.300,00
		9. Maor	3.102.200,00
		10. Moronyamplung	6.482.900,00
		11. Mangkujajar	3.030.800,00
		12. Puter	4.910.800,00
		13. Pelang	5.988.300,00
		14. Dumpiagung	4.911.000,00
		15. Randubener	3.296.100,00
		16. Lopang	6.969.000,00
		17. Gintungan	3.528.700,00
		18. Katemas	3.748.000,00
20.	Kalitengah	1. Pucangro	3.641.400,00
		2. Pucangtelu	3.351.000,00
		3. Somosari	3.203.900,00
		4. Jelakcatur	3.128.700,00
		5. Mungli	3.149.400,00
		6. Pegangsalan	2.916.000,00
		7. Dibe	3.171.100,00

1.	2	3	4
		8. Butungan	2.893.300,00
		9. Lukrejo	3.726.600,00
		10. Tiwet	2.760.400,00
		11. Blajo	2.792.800,00
		12. Kalitengah	2.974.000,00
		13. Gambuhan	2.703.000,00
		14. Cluring	2.809.100,00
		15. Bojoasri	3.413.900,00
		16. Kediren	3.041.000,00
		17. Kuluran	3.387.500,00
		18. Canditunggal	3.005.900,00
		19. Sugihwaras	3.483.700,00
		20. Tunjungmekar	2.957.600,00
21.	Turi	1. Geger	3.853.500,00
		2. Badurame	3.344.300,00
		3. Karangwedoro	3.785.400,00
		4. Wangunrejo	3.084.100,00
		5. Putatkumpul	3.829.300,00
		6. Keben	3.384.600,00
		7. Sukoanyar	3.628.900,00
		8. Kemlagigede	3.866.600,00
		9. Turi	3.442.200,00
		10. Kemlagilor	3.207.900,00
		11. Sukorejo	3.092.100,00
		12. Tawangrejo	3.809.700,00
		13. Bambang	2.985.000,00
		14. Pomahanjangan	3.066.200,00
		15. Tambakploso	3.438.200,00
		16. Balun	5.325.900,00
		17. Ngujungrejo	3.022.600,00
		18. Kepundibener	3.622.200,00
		19. Gedongboyountung	4.127.500,00
22.	Lamongan	1. Rancangkencono	3.832.100,00
		2. Karanglangit	4.597.000,00
		3. Pangkatrejo	4.150.600,00
		4. Kebet	3.658.100,00
		5. Sendangrejo	4.016.800,00
		6. Sumberejo	5.095.400,00
		7. Tanjung	6.063.200,00
		8. Plosowahyu	9.163.400,00
		9. Wajik	4.346.700,00
		10. Kramat	4.017.800,00
		11. Made	9.608.400,00
		12. Sidomukti	4.487.100,00
23.	Tikung	1. Wonokromo	4.993.200,00
		2. Soko	5.093.300,00
		3. Guminirejo	3.829.700,00
		4. Bakalanpule	4.753.000,00
		5. Takeraklating	6.336.000,00

1.	2	3	4
		6. Kelorarum	3.510.800,00
		7. Jotosanur	4.333.400,00
		8. Pengumbulanadi	4.532.900,00
		9. Jatirejo	4.909.200,00
		10. Dukuhagung	4.982.000,00
		11. Tambakrigadung	7.044.400,00
		12. Botoputih	3.325.900,00
		13. Balongwangi	4.518.500,00
24.	Karangbinangun	1. Waruk	3.018.600,00
		2. Sukorejo	4.037.300,00
		3. Karanganom	3.279.900,00
		4. Somowinangun	3.411.900,00
		5. Ketapangtelu	3.881.100,00
		6. Mayong	4.038.200,00
		7. Palangan	3.761.100,00
		8. Blawi	4.366.200,00
		9. Banjarejo	3.844.200,00
		10. Putatbangah	3.493.400,00
		11. Banyuurip	2.978.800,00
		12. Pendowolimo	3.866.800,00
		13. Baranggayam	2.922.900,00
		14. Watangpanjang	3.106.400,00
		15. Sambopinggir	3.574.500,00
		16. Priyoso	2.921.500,00
		17. Windu	3.382.700,00
		18. Bogobabadan	3.269.500,00
		19. Gawerejo	3.209.600,00
		20. Kuro	3.264.300,00
		21. Karangbinangun	3.092.200,00
25.	Deket	1. Sidorejo	3.346.200,00
		2. Dlanggu	4.378.100,00
		3. Laladan	3.457.800,00
		4. Deketkulon	5.659.800,00
		5. Deketwetan	4.505.200,00
		6. Sugihwaras	3.616.600,00
		7. Dinoyo	3.861.600,00
		8. Sidomulyo	3.409.200,00
		9. Rejosari	20.600.700,00
		10. Pandanpancur	6.549.500,00
		11. Sidobinangun	3.569.900,00
		12. Babatagung	3.668.900,00
		13. Tukerto	3.885.900,00
		14. Weduni	3.187.500,00
		15. Rejotengah	3.534.200,00
		16. Srirande	3.803.500,00
		17. Plosoboden	3.534.900,00
26.	Glagah	1. Soko	3.300.700,00
		2. Morocalon	2.857.700,00
		3. Gempolpendowo	2.963.300,00

1.	2	3	4		
		4. Pasi	3.271.700,00		
		5. Rayunggumuk	3.438.500,00		
		6. Menganti	3.378.300,00		
		7. Margoanyar	3.375.300,00		
		8. Began	2.662.000,00		
		9. Mendogo	2.920.500,00		
		10. Kentong	3.120.300,00		
		11. Sudangan	2.973.900,00		
		12. Medang	2.957.900,00		
		13. Duduklor	3.052.300,00		
		14. Glagah	3.633.300,00		
		15. Wangen	3.059.300,00		
		16. Tanggungprigel	3.177.100,00		
		17. Karangagung	3.070.300,00		
		18. Bangkok	2.927.600,00		
		19. Jatirenggo	3.205.000,00		
		20. Bapuhbaru	3.026.000,00		
		21. Bapuhbandung	3.071.800,00		
		22. Meluntur	2.851.400,00		
		23. Konang	2.719.200,00		
		24. Dukuhtunggal	3.592.400,00		
		25. Panggang	2.887.400,00		
		26. Wonorejo	2.880.000,00		
		27. Wedoro	2.788.200,00		
		28. Karangturi	3.130.600,00		
		29. Meluwur	2.862.500,00		
		27.	Sarirejo	1. Kedungkumpul	3.953.500,00
				2. Dermolemahbang	6.416.400,00
				3. Simbatan	4.012.700,00
4. Sumberejo	3.905.900,00				
5. Canggih	3.115.400,00				
6. Beru	3.613.600,00				
7. Tambakmenjangan	5.991.100,00				
8. Gempoltukmloko	4.051.700,00				
9. Sarirejo	4.100.000,00				
	TOTAL		1.861.976.900,00		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI